Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Kasus PT Nusa Konstruksi Enjiniring)

Corporate Responsibility for Corruption the Procurement of Goods/Services in the Government (Case Study of PT Nusa Konstruksi Enjiniring)

Vita Mahardhika*

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

*Corresponding Email: vitamahardhika@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dibuat untuk mengkaji dan mengetahui teori pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dalam hukum pidana Indonesia dan untuk menelaah bagaimana pertanggungjawaban bagi korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah serta upaya apa saja yang dilakukan pemerintah untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normatif law research*) menggunakan kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang, yang berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, titik rawan potensi terjadinya korupsi adalah dimulai pada tahap perencanaan pengadaan yang dalam proses ini sering terjadi *mark up* dan praktek korupsi, kolusi, nepotisme yang dapat merugikan keuangan negara. Dengan tetap mengedepankan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) dan berpedoman pada undang-undang yang berlaku, beberapa teori pembedaan misalnya Teori *Strict Liability*, Teori Identifikasi, Teori *Vicarious Liability* dapat digunakan oleh penegak hukum dalam menjerat korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Korporasi; Pengadaan Barang/Jasa.

Abstract

This research is to study and find out the theory of criminal responsibility for corporations in Indonesian criminal law and to examine how the responsibility for corporations that commit corruption in the process of procuring government goods / services and the government's efforts to prevent and eradicate corruption in Indonesia. The research method is used normative law research using normative legal cases in the form of legal behavior products, for example reviewing draft laws, which focuses on positive law inventories, legal principles and doctrines, legal findings, legal comparisons, and legal history. In the process of procuring government goods / services, the potential prone point for corruption is starting at the procurement planning stage, where mark-ups often occur and practices of corruption, collusion and nepotism that can harm State finances. With regard to the principle of geen straf zonder schuld and guided by applicable laws, several criminal theories such as the Strict Liability Theory, Identification Theory, Vicarious Liability Theory can be used by law enforcers to ensnare corporations that commit criminal acts of corruption in the process of procuring government goods / services.

Keywords: Criminal Liability; Corporation, Procurement Of Goods /Services.

How to Cite: Mahardhika, V. (2021). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Kasus PT Nusa Konstruksi Enjiniring). *Jurnal Mercatoria*. 14 (1): 1-8.

PENDAHULUAN

Batasan pengertian korporasi erat kaitannya dengan masalah dalam bidang hukum perdata. Menurut (Rahardjo, 1986), Korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari "*corpus*" yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur "*animus*" yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya, kematiannyapun juga ditentukan oleh hukum".

Perkembangan korporasi sebagai subjek tindak pidana terjadi di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dalam perundang-undangan khusus. Sedangkan KUHP sendiri masih tetap menganut subjek tindak pidana berupa "orang" (lihat pasal 59 KUHP). Sedangkan subjek tindak pidana korporasi sebagai contohnya dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi identik dengan istilah KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi konvensional yang lumrah dan mudah dilakukan adalah korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah bukan merupakan korupsi yang benar-benar memerlukan ketelaahan pelaku/bukan benar-benar canggih karena dengan cara penggelembungan harga (*mark up*), penyalahgunaan wewenang hal ini begitu mudah dilakukan oleh para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Sumber-

sumber potensial terjadi korupsi dalam pengadaan barang/jasa adalah pemberian suap, penggelapan, pemalsuan, penyalahgunaan jabatan/wewenang, pertentangan kepentingan (memiliki usaha sendiri), komisi, nepotisme, kontribusi/sumbangan *illegal*. Hampir setiap tahapan dalam proses pengadaan barang/jasa rentan akan potensi korupsi oleh korporasi.

Korupsi yang dilakukan oleh korporasi dapat kita pelajari dari kasus PT Duta Graha Indah (PT DGI) yang telah berganti nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring (PT NKE) yang divonis membayar denda sebesar 700 juta rupiah dan membayar uang pengganti sejumlah 85.4 miliar, serta hukuman tambahan dengan melarang PT NKE mengikuti tender proyek pemerintah selama enam bulan. Vonis tersebut merupakan vonis pertama bagi perusahaan/korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi. Dalam kasus ini PT NKE terbukti memperkaya korporasi sejumlah 240 miliar melalui delapan proyek yang diperoleh.

Adapun yang menjadi rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu: (1) Bagaimanakah pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa?; (2) Upaya apa saja yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi khususnya sektor pengadaan barang/jasa?

Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengkaji dan mengetahui teori pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana Indonesia dan untuk menelaah bagaimana pertanggungjawaban bagi korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan barang/jasa serta upaya apa saja yang dilakukan pemerintah untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif (*normatif law research*) menggunakan kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum (Muhammad, 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa

Pembebanan pertanggungjawaban dalam hukum, terdapat beberapa pandangan yang dikemukakan oleh para ahli. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik meliputi: kemampuan bertanggung jawab; kesalahan dalam arti luas, yaitu sengaja dan/atau kealpaan; dan tidak ada alasan pemaaf (Abidin, 1983).

Untuk mengatakan kesalahan pada pelaku, maka harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut si pelaku itu sendiri, yaitu kelakuannya dan akibat yang ditimbulkan; dan *dolus* atau *culpa* (Kanter & Sianturi, 2002).

Menurut Andi Hamzah (Hamzah, 2012), bahwa kesalahan dalam arti luas meliputi tiga hal, yaitu pertama sengaja, kedua kelalaian, ketiga dapat dipertanggungjawabkan.

Memperhatikan berbagai pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa seseorang dapat dipidana jika dipenuhi syarat pemidanaan yang objektif atau perbuatan pidana (*actus reus*) dan syarat pemidanaan yang subjektif atau pertanggungjawaban pidana (*mens rea*)

atau yang disebut kesalahan (Hamzah, 2004).

Asas *actus reus* dan *mens rea* itu, yang lengkapnya berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea* tersebut, dapat diartikan bahwa suatu perbuatan itu tidak dapat membuat orang bersalah, kecuali bilamana dilakukan dengan niat jahat. Dua hal yang menjadi pokok penting dari *actus reus* dan *mens rea* itu adalah pertama, adanya perbuatan lahiriah sebagai penjelasan dari kehendak, misalnya perbuatan mengambil pada perkara pencurian; dan kedua, kondisi jiwa, apakah perbuatan itu dilakukan dengan maksud jahat atau tidak (Bawengan, 1983).

Di Indonesia dalam aturan perundangan-undangnya baru muncul dan dikenal badan hukum/korporasi sebagai subjek tindak pidana pada tahun 1951 yaitu dikenal dalam Undang-undang penimbunan barang-barang dan dikenal secara luas melalui Undang-undang No. 7 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi selanjutnya pengaturan tindak pidana korporasi dapat ditemukan pada pasal 17 ayat (1) Undang-undang No. 11 PNPS Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi dan Pasal 49 Undang-undang No. 9 Tahun 1976 Narkotika.

Tetapi secara umum seperti yang tercantum dalam pasal 59 KUHP, subjek tindak pidana korporasi belum dikenal dan diakui sebagai subjek hukum dalam tindak pidana secara umum adalah orang (Muladi & Priyatno, 2012). Dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana, hal ini menimbulkan permasalahan dalam hukum pidana kita, khususnya yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana pada korporasi. Apakah unsur kesalahan tetap dapat dipertahankan seperti halnya pada manusia. Menurut Sauer (Sudarto, 1983), ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu: (a) sifat melawan hukum (*unrecht*); (b) kesalahan (*schuld*), dan (c) pidana (*strafe*).

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan hukum pidana Indonesia dinyatakan bahwa pengertian korporasi itu adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Penyebutan korporasi sebagai subjek hukum juga tercantum dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 angka 13 Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 1 angka 21 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Ada tiga elemen untuk bisa meminta pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu pengurus atau wakil korporasi itu harus mempunyai kewenangan dalam bertindak untuk kepentingan korporasinya dalam lingkup kewenangannya. Kedua, tindakan pengurus atau wakil itu adalah untuk kepentingan korporasinya. Ketiga, tindak pidana yang dilakukan tersebut ditoleransi korporasinya.

Tuntutan akan perlindungan ketentraman masyarakat menuntut pertanggungjawaban pidana (*criminal liability, criminal responsibility*) yang lebih luas dan adil kepada korporasi. Hal ini dapat dikatakan bahwa pemidanaan korporasi atas dasar kepentingan masyarakat tidak atas dasar tingkat kesalahan subjektif. Dalam hal ini *strict liability* yang meninggalkan asas *mens rea* yang merupakan refleksi cenderung untuk menjaga keseimbangan dan kepentingan sosial (Muladi & Priyatno, 1991).

Dalam rangka mempertanggungjawabkan korporasi

secara pidana, dikenal konsep *direct corporate criminal liability* atau doktrin pertanggungjawaban pidana langsung. Menurut doktrin ini, perusahaan dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan perusahaan dan dipandang sebagai perusahaan itu sendiri.

Dalam keadaan demikian, mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu pertanggungjawaban perusahaan tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi (Nawawi Arief, 2002).

Menurut Jaya (2013) menyatakan yang paling relevan digunakan untuk mempidanakan korporasi yaitu *doctrine strict liability* dan *doctrine identification* atau teori pelaku fungsional, teori kawat berduri serta *doctrine vicarious* yang mengandung arti bahwa korporasi ikut mengambil beban tanggung jawab atas perbuatan pengurus, pengurus melakukan delik, maka yang turut bertanggung jawab adalah korporasi sehingga yang dipidana pengurus dan korporasi. Pentingnya mempidanakan korporasi karena hasil kejahatan yang belum tersentuh, padahal seharusnya bisa disentuh. Dalam peraturan *a quo*, korporasi tidak hanya didefinisikan sebagai subjek pelanggaran saja tetapi juga diatur dalam proses kriminalnya atau dalam proses pidananya (Satria, 2017).

Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyatakan kasus korupsi yang dilakukan melalui pengadaan barang/jasa pemerintah masih marak dilakukan. Kepala LKPP Roni Dwi Susanto dalam situs <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191110163518-4-114102/pengadaan-barang-jasa-pemerintah-rp1153-t-rp200-t-dikorupsi/> menyebutkan, dari anggaran pengadaan barang/jasa pemerintah senilai

Rp. 1.153 triliun, ada sekitar 30% dana yang dikorupsi atau sekitar Rp. 200 triliun.

Titik rawan penyimpangan di sektor pengadaan barang/jasa ini telah dimulai dari tahap perencanaan pengadaan. Pada tahap ini cenderung terjadi penggelembungan (*mark-up*) anggaran yang merugikan keuangan Negara. Kerawanan penyimpangan juga terjadi pada tahap pembentukan lelang, pra kualifikasi perusahaan, penyusunan dokumen lelang, tahap pengumuman dokumen lelang, dan tahap penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS).

Ada beberapa modus operandi keterlibatan pejabat publik dan perusahaan swasta dalam korupsi pengadaan barang/jasa. Modus yang digunakan antara lain: (1) suap pihak swasta kepada pejabat publik; (2) pejabat publik menggunakan perusahaan boneka/perusahaan tertentu untuk diajak kerjasama menjalani korupsi; dan (3) kolusi antar peserta tender, dan praktek yang tidak kompetitif.

Dalam situs <https://www.theindonesianinstitute.com/> menyebutkan korupsi di sektor pengadaan barang/jasa pemerintah setidaknya akan mengakibatkan tiga hal yaitu rendahnya kualitas barang/jasa pemerintah, kerugian negara, dan rendahnya nilai manfaat yang didapatkan.

Sebagai contoh PT Nusa Konstruksi Enjinering atau PT NKE yang sebelumnya bernama PT Duta Graha Indah atau PT DGI diputus bersalah dalam perkara korupsi proyek pembangunan rumah sakit khusus infeksi dan pariwisata Universitas Udayana tahun anggaran 2009 sampai dengan 2010.

Perjalanan kasus PT NKE sendiri berawal pada 24 Juli 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan perusahaan ini sebagai tersangka. Penetapan PT NKE sebagai tersangka merupakan pengembangan penyidikan perkara yang sama dengan tersangka Dudung Purwadi selaku Direktur Utama dan Made Meregawa selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

Dalam putusan PT NKE diwajibkan membayar denda Rp. 700 juta. Selain itu mewajibkan PT NKE membayar uang pengganti sejumlah Rp 85,4 miliar, hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan dengan melarang PT NKE mengikuti tender proyek pemerintah selama enam bulan. Menilik tuntutan Jaksa Penuntut Umum, vonis hakim dinilai lebih rendah. Jaksa menuntut PT NKE dijatuhi hukuman denda Rp. 1 miliar dan membayar uang pengganti Rp. 188,7 miliar dan meminta agar mencabut hak PT NKE mengikuti tender pemerintah hingga dua tahun.

Dalam sidang putusan ini, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menyatakan PT NKE terbukti memperkaya korporasi sejumlah Rp. 240 miliar melalui delapan proyek yang diperoleh dari mantan politikus Partai Demokrat Muhammad Nazarudin (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190103193656-12-358318/vonis-perdana-korporasi-korup-pt-nke-didenda-rp700-juta>).

PT NKE didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 dan pasal 64 ayat (1) KUHP yang termasuk korporasi; (b) dengan melawan hukum; (c) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; (d) dapat merugikan negara atau perekonomian negara; (e) perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut.

Menurut penulis, penjatuhan vonis terhadap PT NKE sudah tepat, karena uang pengganti sebagai pidana tambahan selain pidana tambahan yang dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, sudah diterapkan. Selain itu terkait dengan pencabutan hak untuk mengikuti tender selama enam bulan, menurut penulis meskipun hal ini dipandang belum dapat menjadikan efek jera, tetapi

putusan ini sudah tepat karena pencabutan hak jangan sampai mematikan korporasi sehingga karyawan perusahaan menerima akibatnya kehilangan pekerjaan dan penghasilan.

Selanjutnya apabila kita analisis menggunakan teori pertanggungjawaban pidana, dalam doktrin hukum pidana ada 5 teori pertanggungjawaban korporasi (Hiariej, 2020). Pertama, teori identifikasi yang menyatakan bahwa suatu korporasi dapat melakukan kejahatan melalui individu yang bertindak untuk dan atas nama korporasi yang memiliki posisi tinggi atau memainkan suatu fungsi kunci dalam pengambilan keputusan korporasi. Kedua, teori *vicarious liability* yang menyatakan bahwa seseorang dapat bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain dalam lingkup pekerjaannya. Teori ini disebut juga teori pertanggungjawaban pengganti dimana unsur kesalahan (*mens rea*) mutlak diperlukan. Ketiga, teori delegasi yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diletakkan kepada orang yang oleh direksi diberi delegasi melakukan kewenangan korporasi. Keempat, teori agregasi yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi jika perbuatan tersebut dilakukan sejumlah orang yang memenuhi unsur delik yang saling berkaitan dan tidak berdiri sendiri. Kelima, teori model budaya kerja yang menyatakan bahwa kebijakan korporasi mempengaruhi cara kerja korporasi dan dapat dimintai pertanggungjawaban. Korporasi merupakan suatu badan hukum yang memiliki kompleksitas dan karakteristik yang berbeda dengan manusia sehingga membutuhkan pidana untuk mencari sebuah alternatif baru untuk mengaturnya (Arifin & Choirunnisa, 2019).

Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi terdapat model pertanggungjawaban korporasi. Pertama, pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab. Kedua,

korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab. Ketiga, korporasi sebagai pembuat dan juga yang bertanggung jawab (Setiyono, 2009).

Dalam kasus PT NKE dapat kita analisis, bahwa berdasarkan doktrin *vicarious liability*, korporasi dan pengurus dapat secara bersama-sama dimintai pertanggungjawaban, perlu diketahui bahwa Dudung Purwadi selaku Direktur Utama dan Mohammad El Idris selaku Wakil Direktur Marketing bertindak untuk dan atas nama korporasi PT NKE bersama-sama bekerja sama dengan Muhammad Nazarudin agar memenangkan tender proyek pembangunan rumah sakit khusus infeksi dan pariwisata Universitas Udayana. Maka jelas tindakan Dudung Purwadi dan Mohammad El Idris dalam rangka memberikan manfaat bagi korporasi, sehingga divonis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

PT NKE merupakan korporasi pertama yang divonis korupsi, hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia telah benar-benar menerima dan menerapkan subjek hukum korporasi dalam tindak pidana korupsi. Dalam konteks pembaharuan hukum pidana sebagaimana dalam RUU KUHP Agustus 2019 disebutkan bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana dan pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh korporasi dikenakan terhadap korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi.

Upaya Pemberantasan Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pemberantasan korupsi membutuhkan kesamaan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri. Dengan adanya persepsi yang sama, pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara tepat dan terarah, agar pemberantasan berjalan lebih efektif, maka hendaknya ketiga strategi ini harus dilakukan secara bersamaan, yaitu (1)

perbaikan sistem misalnya mendorong transparansi penyelenggara negara seperti KPK menerima laporan LHKPN dan juga gratifikasi; memberikan rekomendasi kepada kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan; memodernisasi pelayanan publik dengan online dan sistem pengawasan yang terintegrasi agar lebih transparan dan efektif; (2) edukasi dan kampanye anti korupsi; (3) strategi represif menyeret koruptor ke pengadilan (aclc.kpk.go.id, 2020).

Upaya pemberantasan korupsi terus dilaksanakan digaungkan oleh KPK secara khusus dalam sektor pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu memanfaatkan teknologi informasi, misalnya mendesain pengadaan barang/jasa secara elektronik, khususnya *electronic purchasing* yang memungkinkan pembelian barang dengan cara yang efektif sehingga mengurangi potensi manipulasi dan proses tender.

Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2021-2022 berfokus pada keuangan negara dengan aksi implementasi *e-payment*, e-katalog, dan Pengadaan Langsung Secara Elektronik (<https://Stranaspk.Kpk.Go.Id/Id/Berita/Peluncuran-Aksi-Pencegahan-Korupsi-Stranas-Pk-2021-2022>, n.d.)

Stranas PK sangat signifikan dalam gerakan kolaborasi KPK sebagai koordinator tim bersama kementerian dan lembaga lain untuk mendorong upaya pencegahan korupsi yang lebih cepat, efektif dan efisien.

Pencegahan korupsi juga dilakukan oleh kejaksaan yang memprioritaskan pemberantasan korupsi melalui pembentukan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan atau dikenal dengan nama TP4 (Zunaidi, 2019).

Dalam upaya memberantas korupsi tidak lepas dari peran KPK, sebagai lembaga anti korupsi diharapkan dapat

menekan dan mereduksi kejahatan korupsi di Indonesia.

SIMPULAN

Perkembangan korporasi sebagai subjek tindak pidana terjadi di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dalam perundang-undangan khusus. Selain memberikan manfaat adanya korporasi dalam semua sektor, korporasi sendiri menjadi salah satu yang berkontribusi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia khususnya dalam sektor pengadaan barang/jasa. Penjatuhannya hukuman kepada korporasi merupakan awal baik bagi pembaharuan hukum pidana Indonesia.

Titik rawan korupsi dalam pengadaan barang/jasa yang dalam hal ini pembuat tindak pidananya adalah perorangan dan korporasi yaitu dimulai dari tahap perencanaan pengadaan. Pada tahap ini cenderung terjadi penggelembungan (*mark-up*) anggaran atau bahkan praktek pengadaan mengada-ngada (proyek pesanan, tanpa evaluasi, pengadaan yang tidak realistis, pengadaan yang mengarah pada pemaketan untuk KKN) yang dalam hal ini merugikan keuangan Negara. Kerugian yang diderita masyarakat akibat korupsi yang dilakukan korporasi sedemikian besar sehingga tidak seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan kepada pengurus saja. Pidana ini juga diharapkan korporasi tidak akan mengulangi tindak pidana lagi dan dapat menaati peraturan perundangan.

Teori dalam pertanggungjawaban korporasi Teori Identifikasi, Teori *Vicarious Liability*, Teori Delegasi, Teori *Agregasi*, Maupun Teori Budaya Kerja merupakan beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan pemidanaan bagi korporasi. Penegak hukum bebas memilih teori dan doktrin yang mana yang akan digunakan sebagai acuan teori pemidanaan. Dengan tetap mengedepankan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) dan

berpedoman pada undang-undang yang berlaku.

Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan oleh berbagai kalangan diantaranya oleh KPK dengan Stranas yang merupakan program percepatan pemberantasan korupsi yang pada tahun 2021-2022 lebih memfokuskan pada implementasi dengan pemanfaatan teknologi informasi. Sedangkan upaya dari kejaksaan yang membentuk TP4 yang bertugas dalam rangka mengawal proyek pemerintah supaya terlaksana sesuai ketentuan perundang-undangan dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Untuk LKPP aktif melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan pengadaan barang/jasa, dan juga mengembangkan aplikasi *e-purchasing* supaya lebih efektif dan meminimalisir potensi terjadinya penggelembungan harga yang muaranya adalah korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abidin, A.Z. (1983). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Pradnya Paramita.
- Arifin, R., & Choirunnisa, S. A. (2019). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Prinsip Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, 12(1). <https://doi.org/DOI:10.31289/mercatoria.v12i1.2349>
- Bawengan, G. W. (1983). *Hukum Pidana di Dalam Teori dan Praktik*. Pradnya Paramita.
- Hamzah, A. (2004). *Asas-Asas Hukum Pidana* (Edisi Revi). Rineka Cipta.
- Hamzah, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*. Sofmedia.
- Hiariej, E. O. . (2020). Korupsi Di Sektor Swasta dan Tanggung Jawab Pidana Korupsi. *Masalah Masalah Hukum*, 49(4), 333–344. <https://stranaspk.kpk.go.id/id/berita/peluncuran-aksi-pencegahan-korupsi-stranas-pk-2021-2022>. (n.d.).
- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Muladi, & Priyatno, D. (1991). *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*. Sekolah Tinggi Hukum Bandung.
- Muladi, & Priyatno, D. (2012). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Kencana Prenada Media Grup.
- Nawawi Arief, B. (2002). *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo, S. (1986). *Ilmu Hukum*. Alumni.
- Satria, H. (2017). Penerapan Pidana Tambahan dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal Yudisial*, 10(2), 155–171.
- Setiyono. (2009). *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bayumedia Publishing.
- Sudarto. (1983). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Sinar Baru.
- Zunaidi, M. (2019). Kedudukan Tim Pengawal Dan Pengamanan Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah (TP4D) Dalam Rangka Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Borneo Law Review*, 3(1), 45.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 7 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Internet

- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191110163518-4-114102/pengadaan-barang-jasa-pemerintah-rp1153-t-rp200-t-dikorupsi/>
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190103193656-12-358318/vonis-perdana-korporasi-korup-pt-nke-didenda-rp700-juta>
- <https://www.theindonesianinstitute.com/aclc.kpk.go.id>, 2020